

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik di Indonesia identik dengan kuantitas laki-laki, politik identik dengan perebutan kekuasaan, dan najis serta tidak cocok bagi perempuan untuk bergabung. Keterlibatan aktif perempuan dalam politik secara signifikan menambah tingkat pemikiran, kepekaan politik, dan pilihan, kebijakan, dan perkembangan yang lebih tinggi yang membutuhkan pemikiran dari seorang perempuan.

Nuasa politik di Indonesia juga masih menghadapi masalah pemisahan orientasi sejauh jumlah perempuan yang secara efektif memperhatikannya, Satu dari yakni sisi penggambaran perempuan. Isu tentang penggambaran perempuan mengemuka dan menjadi kenyataan setelah masalah ini diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Undang –undang Nomer 12 Tahun 2003 Diungkapkan bahwasanya kelompok ideologis dalam mengusulkan penugasan untuk administrasi bisa fokus pada penggambaran perempuan sekitar 30%. berupaya membentuk penggambaran perempuan Melewati pendekatan politik.

Kuantitas 30% untuk pelamar administrasi wanita termasuk kebijakan pemerintah mengenai minoritas di masyarakat yang berisi strategi porsi bagi wanita agar bisa memasuki masalah pemerintahan Melewati pendatang baru yang berwibawah hambatan utama bagi keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia yakni bertahannya androsentrisme di sektor publik. Tulisan yang saya buat ini memberi fakta tentang keterlibatan perempuan di legislatif pasca affirmative action, serta hambatan dan kesulitan mereka untuk bergabung dengan

legislatif negara, berlandaskan tinjauan literatur terkait (DPR RI).

Setelah affirmative action hasil pemilu 2004-2019 meningkat dari tahun sebelumnya affirmative action dan pelaksanaan hasil pemilu 2004-2019 dengan terpilihnya perempuan mewakili Indonesia di parlemen, affirmative action hasil pemilu 2004-2019 meningkat jumlah perempuan yang terpilih untuk mewakili Indonesia di parlemen. Banyak kesulitan, termasuk konstruksi sosial, kurangnya dukungan dari partai politik, dan sikap perempuan, tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan terus-menerus perempuan di parlemen. Perempuan yang berhasil terpilih dan masuk masyarakat ditantang di legislatif untuk menunjukkan kemampuannya dan menaikkan kualitasnya.

Politik termasuk bermacam aktivitas dalam sesuatu sistem politik(negeri) yang mengaitkan proses pengambilan keputusan dengan mengenali tujuan dari sistem tersebut, menetapkan prioritas bersumber pada tujuan yang sudah diseleksi, serta memastikan kebijakan publik buat melakukan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, ranah politik ditatap selaku pintu masuk untuk wanita buat menggapai revisi yang di idamkan. Politik termasuk daerah sangat bawah di mana hak- hak lain diwujudkan. Bila hak- hak politik wanita tidak dilaksanakan, hingga hak- hak mereka di bidang lain semacam pembelajaran serta kesehatan pula tidak terlaksana.¹

Perempuan di semua dunia, khususnya perempuan Indonesia, berusaha untuk mengamankan hak politik mereka. Awalnya, perebutan hak politik hanya sebatas hak memilih dalam pemilu; tetapi, ketika perjuangan berlangsung, dibutuhkan partisipasi aktif mereka dalam politik langsung, yaitu, hak untuk dipilih dan duduk di parlemen. Dengan demikian, mereka mampu mempengaruhi

¹Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik*, Jakarta: Rahima, 2007, hal. 12.

proses pembuatan kebijakan.

Sebelum masuk terlalu jauh ke ranah yang lebih teknis, perlu dicermati prasyarat-prasyarat adanya proses politik yang demokratis. Kebutuhan utama masyarakat untuk dianggap demokratis yakni membuka pintu bagi ambisi individu, dan satu dari cara untuk melakukannya yakni dengan membiarkan warga negara membentuk partai politik. Di sini akan tercermin keinginan rakyat sebagai lambang demokrasi, dan tersedia aktor-aktor yang siap mengemban amanah rakyat. Partai politik berfungsi sebagai pilar yang menopang demokrasi, yang menyiratkan bahwasanya tidak adanya partai politik membuat demokrasi menjadi kekosongan kekuasaan tanpa legitimasi. Oleh karena itu, partai politik menempati peran utama dalam pendidikan politik, dan masuk akal untuk mengharapkan mereka untuk memberi demokrasi yang sehat dan efektif.²

Menurut kajian di bidang ilmu politik, partai politik dianggap esensial bagi berjalannya demokrasi. Partai politik sangat penting untuk pembangunan demokrasi yang kuat dan sehat karena kualitas partai mempengaruhi penentuan perwakilan dan tanggung jawab politik. Partai politik berperan vital dalam menyalurkan harapan rakyat untuk kesejahteraan negara dan negara; mereka juga berfungsi sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan rakyat. kecuali itu, hanya partai politik yang secara eksplisit diakui dan dikendalikan oleh hukum sebagai entitas yang berkontribusi terhadap perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Partai politik sendiri merupakan sarana untuk berkomunikasi yang di mana Partai politik tidak bisa dipisahkan dari istilah ideologi, karena ideologi

² Azies Bauw, PERANAN PARTAI POLITIK DALAM membentuk PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA

memegang peranan penting dalam menentukan jalannya satu partai politik. Menurut Lane, ideologi yakni karakteristik utama. Masalah filsafat politik yakni siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana mereka dipilih, dan nilai apa yang mereka pimpin. Hal ini berhubungan dengan pemimpin seperti apa yang dibutuhkan satu negara untuk dianggap demokratis. satu dari cara untuk mencapai ini yakni dengan memungkinkan orang untuk membuat partai politik. Di sini akan tercermin keinginan rakyat sebagai lambang demokrasi, dan tersedia aktor-aktor yang siap mengemban amanah rakyat.

Partai politik berfungsi sebagai pilar yang menopang demokrasi, yang menyiratkan bahwasanya tidak adanya partai politik membuat demokrasi menjadi kekosongan kekuasaan tanpa legitimasi. Oleh karena itu, partai politik menempati peran utama dalam pendidikan politik, dan masuk akal untuk mengharapkan mereka untuk memberi demokrasi yang sehat dan efektif.³

Menurut kajian di bidang ilmu politik, partai politik dianggap esensial bagi berjalannya demokrasi. Partai politik sangat penting untuk pembangunan demokrasi yang kuat dan sehat karena kualitas partai mempengaruhi penentuan perwakilan dan tanggung jawab politik. Partai politik berperan vital dalam menyalurkan harapan rakyat untuk kesejahteraan negara dan negara; mereka juga berfungsi sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan rakyat. kecuali itu, peran mendasar lain yang dimainkan oleh partai politik yakni bahwasanya hanya partai politik yang secara formal diakui dan diatur oleh UU sebagai lembaga yang berperan dalam membentuk perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang memenuhi syarat untuk memimpin masyarakat secara keseluruhan, tanpa

³Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011 , hal 31

memandang agama, semangat sosial. , kekayaan, kemampuan akademis, fisik ataupun penampilan, ras ataupun etnis, ataupun jenis kelamin. Apakah berlandaskan hereditas (stratifikasi tertutup) ataupun tidak, masalah hereditas ada selama persyaratan tersebut terpenuhi. Ideologi juga melibatkan beberapa argumen yang meyakinkan ataupun menyanggah (refute) sudut pandang yang berlawanan. Ketiga, ideologi mempunyai dampak yang signifikan pada banyak segi keberadaan manusia, antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.⁴

Partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai ideologi, Satu dari PKS, sebagai sarana pemikiran politik untuk mencapai satu tujuan. Karena itu, sebagai organisasi politik nasional, PKS bekerja untuk mencapai tujuan masyarakat madani yang adil, makmur, dan bermartabat bersama dengan identitas politik lainnya untuk melambangkan cita-cita bangsa secara keseluruhan. PKS yakni badan politik nasional yang berinteraksi dengan entitas politik lain, sedangkan Islam melambangkan perbedaan lahiriah. PKS berpikir dan ingin menggarisbawahi bahwasanya tindakan politik internal yakni "ibadah" dengan menetapkan Islam sebagai iman dan cita-cita moral.⁵

Sebuah organisasi politik bernama Partai Keadilan Sejahtera dibentuk pada tahun 1997 oleh mantan aktivis dakwah yang melihat peluang untuk menggunakan jaringan universitas mereka untuk melakukan dakwah dan kegiatan sosial. Partai Keadilan Sejahtera dikandung dalam rahim kebangkitan Islam yang dimulai di Timur Tengah dan terus menyebar ke semua dunia Islam. satu dari ciri dari gerakan kebangkitan ini yakni keinginan untuk lahirnya kembali Islamisme,

⁴Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011 , hal 31

⁵Warjio, "Falsafah dan Strategi Politik Dakwah PKS", JurnalPOLITEIA, Vol 3,No 2, 2011, hal 92

ataupun filsafat politik Islam. berlandaskan program perjuangan PKS, partai ini termasuk lambang Islamisme.⁶ PKS yakni organisasi politik yang mengikuti ajaran Hasan Al-Banna dan filosof Timur Tengah lainnya, seorang tokoh spiritual Mesir yang membentuk Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Hubungan antara PKS dan IM tetap terjalin bahkan setelah PKS bubar pada tahun 1997 di bawah Orde Baru Suharto. administrasi.⁷

Oleh karena itu, PKS termasuk lembaga yang memanfaatkan partai politik sebagai alat ataupun “kendaraan” era reformasi untuk membuka kran politik dan memasuki dunia politik yang sebenarnya. PKS yakni “panglima” cara penyebarluasan cita-cita dan prinsip kebenaran dan keadilan kepada semua rakyat, khususnya Indonesia, karena menyebarkan ajaran dalam segala bentuk dan segi, yang juga bisa dipandang sebagai “doktrin”. Sebagai partai dakwah, PKS sejak awal mengabdikan untuk mengupayakan aspirasi rakyatnya dengan mempertahankan standar moral akidah Islam dan mengemban misi dakwah untuk kemaslahatan umat.

Sudut pandangan partai tentang demokrasi. Karena menjadikan kelebihan ketika mengkaji satu organisasi dimana satu pemikiran biasanya lebih terintialisasi meskipun wajib didasari pula dengan pengaruh politik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini PKS di lihat dari sejarahnya yaitu :

1. PKS secara genealogis lahir dan berkembang sejak awal tahun 1980-an.

Namun ada perbedaan proses masuknya ide-ide tersebut di Indonesia. Kalau

PKS perkenalan idenya lebih banyak diinspirasi oleh terjemahan buku-buku

⁶M. Imdadun Rahmat.(2008) Ideologi Pemikiran Politik PKS: Masjid Kampus ke Gedung Parlemen,, (Yogyakarta: LKIS ,2008), halaman 66

⁷Mohammad Riza Widyarsa, Syaifuddin Fadhillah, dkk, Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia Terhadap Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera, Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol 1, No.1, Maret

pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

2. Masuknya ide-ide gerakan keduanya sama-sama terinspirasi dari gerakan-gerakan Islam ' di timur-tengah. Gerakan Islam di Timur tengah memang telah lama selalu memberi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam sedunia, khususnya di Indonesia. PKS memang banyak terinspirasi baik : pemikiran maupun strategi pergerakan dari Gerakan: Ikhwanul Muslimin di Mesir, namun menurut penulis PKS sendiri bukan termasuk 'cabang' Ikhwanul Muslimin di Indonesia.
3. Kalangan kampus menjadi sasaran utama peminat ide-ide keduanya. Mahasiswa khususnya pada kampus-kampus non-keagamaan seperti UGM, ITB, IPB, Unpad dan UI terbukti memberi respon positif terhadap keberadaan ide keduanya. kecuali ide-ide keduanya 'baru' sejak awal 1980-an. Kehausan akan nuansa keislaman yang dibutuhkan oleh mahasiswa kampus sekuler, menjadikan keduanya Cepat berkembang dibandingkan di kampus dengan label keislaman khususnya IAIN.⁸

PKS Pilpres 2019 termasuk satu dari 20 partai (nasional dan lokal) yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk mengikuti pemilihan umum. Partai-partai peserta Pemilu 2019 wajib Melewati proses penyaringan untuk memastikan calonnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Keterwakilan Perempuan 30 persen menjadi satu dari prasyarat pemilihan umum 2019. Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 mengatur bahwasanya sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh persen) perempuan wajib terwakili dalam daftar

⁸ PKS & HTI : genealogi & pemikiran demokrasi / Arief Ihsan Rathomy halaman 107

calon potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243. Keterlibatan bangsa ini, meskipun belum seluruhnya, dalam membela hak asasi manusia yakni ditunjukkan dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum Indonesia.⁹

Mengadopsi kebijakan 30% perwakilan perempuan yakni contoh tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif yakni istilah yang digunakan di ranah publik untuk menggambarkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga publik yang berpihak pada kelompok tertentu dengan memberi mereka keuntungan ataupun perlakuan istimewa, termasuk kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga publik, seperti parlemen, pemerintah, lembaga pendidikan, dan tempat-tempat kerja.¹⁰

Menurut Henry Subiakto, keterlibatan politik perempuan tidak hanya diperoleh melewati pemungutan suara, namun juga melewati cara perempuan mencari jabatan. Menurutnya, jumlah perempuan dalam politik telah tumbuh, namun tidak secara dramatis, sampai saat ini.¹¹ Perempuan kurang terwakili di arena politik dan institusi politik formal dibandingkan dengan laki-laki. Rendahnya proporsi perempuan yang berpartisipasi aktif dalam institusi politik juga mengurangi ruang gerak dan suara yang mewakili perempuan; Oleh karena itu, kondisi ini tidak menguntungkan bagi perempuan, karena tidak hanya mempengaruhi keberadaan dan partisipasi perempuan dalam politik negara namun juga ruang gerak dan suara yang mewakili perempuan. Namun pembatasan pelibatan perempuan ini berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap cara pemberdayaan perempuan, termasuk belum

⁹ Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

¹⁰ Hendri Sayuti. Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). Vol. 12 No.1. Merana, Januari – Juni 2013. hal 41

¹¹ Henry Subiakto dan Racmah Ida, Komunikasi politik, media, dan demokrasi, KENCANA 2014 hal.189-190

optimalnya ekspresi kepentingan politik dan ekonomi perempuan.¹²

Penulis tertarik untuk membahas bagaimana cendekiawan politik PK Sejahtera memaknai partisipasi 30 persen perempuan dalam affirmative action, khususnya di Dewan Perwakilan Daerah PK Sejahtera di Jakarta Timur. Oleh karena itu, penulis memakai Judul **“Pemikiran Politik Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Affirmative Action Terkait Pencalonan Perempuan Tahun 2019 (Studi Kasus : DPD Jakarta Timur).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya latar belakang yang telah disebutkan diatas sebelumnya, akibatnya masalah penelitian ini menjelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera memandang konsep kebijakan Affirmative Action (30%) yang berlaku dalam mekanisme Pemilihan Umum 2019 di Indonesia ?
2. Sejauhmana tingkat partisipasi politik kader perempuan dalam internal Partai Keadilan Sejahtera di DPD Jakarta timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penemuan penelitian kali ini penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menelaah issue partisipasi politik perempuan dalam Internal Partai Keadilan Sejahtera melalui konsep kebijakan Affirmative Action (30%) yang berlaku terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
2. Untuk memahami tingkat keterlibatan politik perempuan dilembaga

¹²*Ibid.*, hal.182

legislatif melalui hasil analisis partisipasi politik perempuan dalam DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai dua aplikasi: akademis, memberi kontribusi untuk studi subjek. Konsep dan gagasan yang terkait dengan affirmative action dan partai politik dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang berhubungan dengan partai politik dan affirmative action. Dan kedua, penulis akan mengajukan keunggulan praktis sebagai satu dari syarat meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik di Universitas Nasional.

1.5 Sistem Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini untuk mendeskripsikan judul yang sudah diangkat oleh penulis yaitu “Pemikiran Politik partai keadilan sejahtera mengenai affirmative action (Studi Kasus : DPD PKS Jakarta Timur)” untuk selanjutnya penulis akan menerapkan sistematika penulis akan menerapkan sistematika penulisan didalam penyusunan penulisan penelitian ini, penulis akan rnebaginya menjadi 6 bab yang akan mempunyai keterkaitan dan hubungan intergal satu dengan yang lain secara sistematis, dan sistematika dalam penulisan yang akan dibuat penulis dalam penelitian ini ialah sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 termasuk bagian pembuka yang akan menguraikan secara jelas mengenai: latar belakang masalah yang dianalisis oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang setelahnya akan dilakukan kajian memakai metodologi penelitian sebagai penjelasan Teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi bagian yang menjelaskan tentang teori juga konsep-konsep yang mampu menjadi kerangka berfikir atas latar belakang masalah yang ada. Dan ada juga beberapa konsep yang penulis dipakai dalam skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai pendekatan yang akan dipakai oleh penulis dalam melakukan studi kali ini. Kemudian terdapat pula penjelasan mengenai jenis serta teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis sesuai berhubungan dengan kebutuhan berikut juga daftar kebutuhan informan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian kali ini. Terakhir yakni penjelasan mengenai teknik yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis terhadap data yang nantinya dikumpulkan serta keterbatasan (*limitasi*) dari studi yang sedang penulis lakukan.

BAB IV PEMBAHASAN Pemikiran Politik Partai Keadilan Sejahtera Mengenai affirmative action (Studi Kasus : DPD PKS Jakarta Timur)”.

Pada bab IV termasuk bab yang akan membahas dari hasil penelitian dilapangan oleh penulis yang dibagi menjadi beberapa sub bab, sehingga bisa menjelaskan hasil penelitian sesuai data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul, adapun beberapa sub bab yang terdapat didalam bab ini antara lain : deskripsi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Gambaran Umum tentang Partai PKS sejarah terbentuknya dan juga peningkatan konsep serta Teori yang berkenaan dengan affirmative action dan partai politik untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan partai politik affirmative action.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir yaitu bab lima akan berisi mengenai hasil penelitian secara umum dari penelitian yang termasuk jawaban dari pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah diajukan di awal. kecuali itu dibagian ini penulis juga akan menyertakan saran yang berhubungan dengan topik dan perkembangannya. Diharapkan juga sarandari penulis bisa bermanfaat secara operasional bagi partai politik dan masyarakat. kecuali itu penulis juga berharap tulisan ini juga bisa berkontribusi dalam peningkatan dunia akademik khususnya untuk ilmu politik dalam melihat satu kerangka rekrutmen yang dilakukan partai-partai politik di Indonesia, walaupun begitu penulis memahami bahwasanya tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga dalam saran ini ditambahkan juga hal-hal yang menjadi kekurangan dalam tulisan ini sehingga penulis-penulis selanjutnya bisa mengisi kekurangan yang terdapat di dalam tulisan.

